

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu Daerah karena menjadi Daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah harus efektif dan efisien karena akan memacu terwujudnya otonomi daerah yang nyata.

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti setiap Daerah memiliki hak penuh dalam mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan dan menggunakan potensi sumber daya yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola pemerintahan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di daerah.

Pemerintah Daerah dalam menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, hal ini mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar.

Pemberian hak otonomi daerah kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menentukan seberapa besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi di daerah yang bersangkutan (Zuhri, 2016). Oleh karena itu sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Biasanya kenaikan pendapatan daerah akan berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan erat sejauh mana kemampuan daerah dalam menarik sumber-sumber potensial yang ada di daerah.

Kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, mengingat karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang memadai untuk memberikan pelayanan dalam pembangunan dan keuangan, inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan dalam mengatur dan mengurus daerah kekuasaannya sendiri. Kemampuan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari

penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang berbentuk unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD (Halim: 2012). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.

Pada perkembangan sektor publik yang pesat seiring diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia ini masih terdapat daerah yang termasuk memiliki kemampuan keuangan yang rendah atau bisa disebut daerah tertinggal. Daerah tertinggal merupakan daerah yang wilayah dan masyarakatnya masih sangat kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional dengan kriteria a). perekonomian masyarakatnya, b). Sumber Daya Manusia (SDM), c). sarana prasarannya, d). kemampuan keuangan daerah, e). aksesibilitas, f). karakteristik daerah.

Indonesia terbagi atas 35 Provinsi kemudian dibagi lagi menjadi Kabupaten/Kota berjumlah 514, namun dari sekian banyaknya Kabupaten/Kota yang tersebar masih terdapat 122 daerah Kabupaten/Kota yang tertinggal. Lebih dari 23% Kabupaten/Kota di Indonesia dinyatakan sebagai daerah tertinggal, jumlah yang cukup banyak untuk sebuah Negara

yang kaya akan sumber dayanya ini. Daerah tertinggal ini didominasi oleh Indonesia Bagian Timur, dimana daerah tertinggal mencapai 103 Kabupaten atau 84,4% dari total 122 Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori tertinggal, sedangkan 19 Kabupaten lainnya berada di Indonesia Bagian Barat. Dalam penanggulangan daerah tertinggal pemerintah sudah memiliki program dalam pembangunan infrastruktur diantaranya peningkatan anggaran dan langkah percepatan.

Berdasarkan lampiran peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal. Berikut tabel daftar 13 Kabupaten Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2024.

Tabel 1.1
13 Kabupaten Tertinggal
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kabupaten
1	Sumba Barat
2	Sumba Timur
3	Kupang
4	Timor Tengah Selatan
5	Belu
6	Alor
7	Lembata
8	Rote Ndao
9	Sumba Tengah
10	Sumba Barat Daya
11	Manggarai Timur
12	Sabu Raijua
13	Malaka

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2021

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 13 Kabupaten dari 22 Kabupaten/Kota yang masih dianggap tertinggal. Ke-13 Kabupaten ini dikatakan tertinggal yaitu berdasarkan: (1) perekonomian masyarakat, (2) sumber daya manusia, (3) sarana prasarana, (4) kemampuan keuangan daerah, (5) aksesibilitas dan (6) karakteristik daerah.

Tabel 1.2

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Ke 13 Kabupaten Tertinggal Di Provinsi NTT
(persen)**

No	Nama Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Pertumbuhan
		2019	2020	
1	Sumba Barat	3,15%	3,96%	0,81%,
2	Sumba Timur	2,13%	3,49%	11,36%
3	Kupang	4,48%	4,90%	0,42%
4	Timor Tengah Selatan	1,94%	2,63%	0,69%
5	Belu	7,19%	7,42%	0,23%
6	Alor	3,03%	3,11%	0,08%
7	Lembata	4,31%	4,48%	0,17%
8	Rote Ndao	2,37%	4,90%	2,53%
9	Sumba Tengah	3,43%	4,02%	1,47%
10	Sumba Barat Daya	0,25%	0,36%	0,11%
11	Manggarai Timur	0,95%	2,10%	1,15%
12	Sabu Raijua	2,89%	3,08%	0,19%
13	Malaka	2,34%	3,63%	1,29%

Sumber: BPS Provinsi NTT, Data diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.2 diatas ini Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sabu Raijua termasuk dalam kriteria daerah tertinggal karena masih terdapat permasalahan mengenai sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka selama dua tahun terakhir. Tingkat pengangguran Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2019 sebesar 0,95%, dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 1,15% yaitu menjadi sebesar 2,10%. Tingkat pengangguran Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2019 sebesar 2,89%, dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,19% yaitu menjadi sebesar 3,08%. Hal ini yang menyebabkan Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sabu Raijua termasuk dalam kriteria daerah tertinggal dari 13 kabupaten tertinggal di Provinsi NTT.

Kriteria yang selanjutnya adalah sumber daya manusia dapat kita lihat berdasarkan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku konstan menurut lapangan usaha.

Tabel 1.3

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016-2021

Lapangan Usaha PDRB	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.151.184,06	1.244.529,19	1.347.788,62	1.441.726,92	1.485.690,00
B - Pertambangan dan Penggalian	105.025,80	97.156,71	89.244,85	84.293,10	91.545,19
C - Industri Pengolahan	136.966,67	15.077,28	16.534,36	18.746,20	19.114,39
D - Pengadaan Listrik dan Gas	481,30	549,86	639,46	646,60	768,64
E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	108,75	116,77	125,48	135,99	147,42
F - Konstruksi	145.351,71	164.424,67	183.519,90	203.647,43	188.809,31
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	296.708,55	327.343,87	365.772,14	411.235,03	407.453,45
H - Transportasi dan Pergudangan	17.002,00	18.610,05	20.211,58	21.683,27	21.930,69
I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.848,55	3.213,32	3.614,71	3.848,02	3.445,35
J - Informasi dan Komunikasi	231.682,83	255.228,42	274.306,80	297.177,61	312.704,55
K - Jasa Keuangan dan Asuransi	11.636,90	13.110,29	14.203,72	14.505,13	14.319,21
L - Real Estate	36.146,57	38.859,46	41.729,99	41.999,12	41.212,23
M,N - Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	345.155,20	391.027,80	444.410,28	490.316,71	510.208,06
P - Jasa Pendidikan	65.587,38	72.919,92	81.213,54	89.275,26	93.267,50
Q - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63.072,56	69.854,38	77.286,32	84.334,48	92.440,29
R,S,T,U - Jasa lainnya	7.918,31	8.507,19	9.023,16	9.783,80	8.692,72
PDRB	249.3607,12	2.720.529,18	2.969.624,88	3.213.354,69	3.291.749,01

Sumber: BPSProv.NTT, Datadiolah tahun 2021

Berdasarkan lapangan usaha, PDRB Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2016 sebesar Rp 2.493.606.12, pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp 2.720.529.18, pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 2.969.624,88, tahun 2019 meningkat menjadi 3.213.354.69,dan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi Rp 3.291.749.01.

Tabel 1.4

Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha PDRB	Tahun				2020
	2016	2017	2018	2019	
A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	305.814,8	399.512,65	435.661,52	468.547,22	1.485.690,00
B - Pertambangan dan Penggalian	2.612,20	3.308,14	3.528,84	3.841,96	91.545,19
C - Industri Pengolahan	9.133,70	14.998,91	16.697,06	18.782,23	19.114,39
D - Pengadaan Listrik dan Gas	162,30	229,31	256,33	257,84	768,64
E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	95,30	116,17	123,77	133,22	147,42
F – Konstruksi	93.520,50	183.740,96	202.764,66	220.650,76	188.809,31
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.7671,50	163.595,26	180.647,13	203.471,08	407.453,45
H - Transportasi dan Pergudangan	27.681,90	55.116,94	61.080,03	66.997,76	21.930,69
I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.525,90	10.734,87	12.639,77	14.393,41	3.445,35
J - Informasi dan Komunikasi	5.909,70	7.461,91	7.972,78	8.403,39	312.704,55
K - Jasa Keuangan dan Asuransi	865,80	1.923,62	2.092,87	2.340,34	14.319,21
L - Real Estate	32.510,10	92.684,34	97.591,05	96.296,72	41.212,23
M,N - Jasa Perusahaan	149,90	266,69	288,24	328,22	0,00
O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	74.781,40	239.927,19	267.060,78	299.850,51	510.208,06
P - Jasa Pendidikan	2.175,00	4.197,47	4.451,38	4.984,54	93.267,50
Q - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.771,70	10.850,82	11.426,49	12.456,93	92.440,29
R,S,T,U - Jasa lainnya	1.130,90	1.779,26	1.946,35	2.264,61	8.692,72
PDRB	677.512,60	1.190.444,51	1.306.229,03	1.424.000,75	3.291.749,01

Sumber: BPS Prov. NTT, Data diolah tahun 2021

Berdasarkan lapangan usaha, PDRB Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2016 sebesar Rp 677.512,60, pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp 1,190,444.51, pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 1,306,229.03, tahun 2019 meningkat menjadi 1,424,000.75 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 3,291,749.01. Dari tabel 1.3 dan 1.4 diatas sektor perekonomian yang menyerap tenaga kerja secara signifikan adalah sektor pertanian, konstruksi, administrasi pemerintahan, real state, dan transportasi.

Kriteria daerah tertinggal berikutnya adalah sarana dan prasana dapat kita lihat berdasarkan transportasi.

Tabel 1.5
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit)
Menurut Daerah Tertinggal Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2019

No	Kabupaten	Mobil Penumpang		Bus		Truk		Sepeda Motor	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Sumba Barat	697	712	59	65	742	761	10.871	12.840
2	Sumba Timur	1.132	1.142	103	103	1.465	1.517	29.121	30.873
3	Kupang	1.551	1.667	47	47	2.927	3.191	41.002	45.486
4	Timor Tengah Selatan	1.399	1.681	113	115	2.173	2.589	40.017	44.280
5	Belu	2.190	2.410	164	175	2.949	3.204	32.738	35.665
6	Alor	660	715	20	23	770	883	18.156	19.290
7	Lembata	317	376	35	42	749	876	17.163	18.417
8	Rote Ndao	340	375	5	5	501	546	11.090	12.061
9	Sumba Tengah	144	150	7	7	126	129	3.083	3.260
10	Sumba Barat Aya	742	892	123	123	1.084	1.307	10.425	11.315
11	Manggarai Timur	708	843	48	55	792	994	16.539	18.395
12	Sabu Raijua	141	146	3	7	133	157	5.591	5.956
13	Malaka	347	394	97	99	754	853	18.869	21.779

Sumber: BPS Pron NTT, Data diolah tahun2021

Tabel 1.6**Panjang Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Daerah Tertinggal Dan Kondisi****Jalan Tahun (km) 2018-2019**

No	Nama Kabupaten	Baik		Sedang		Rusak		Rusak Berat	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Sumba Barat	58.72	50.00	2.47	10.26	2.00	2.53	24.08	24.91
2	Sumba Timur	111.16	99.31	32.80	19.09	20.00	14.37	121.84	129.73
3	Kupang	160.97	164.37	23.41	11.21	55.00	45.60	108.22	126.33
4	Timor Tengah Selatan	165.18	172.56	5.70	4.50	6.00	5.85	118.23	111.85
5	Belu	56.52	54.72	5.90	7.70	0.60	0.60	0.60	0.60
6	Alor	31.86	27.79	9.20	8.73	35.00	25.68	47.66	61.62
7	Lembata	18.26	22.30	4.36	0.00	-	0.00	16.36	16.70
8	Rote Ndao	23.01	23.41	5.00	4.60	-	0.00	-	0.00
9	Sumba Tengah	18.58	18.30	5.10	1.50	2.00	1.20	0.80	5.45
10	Sumba Barat Daya	76.77	67.45	-	6.14	0.07	3.20	6.23	6.28
11	Manggarai Timur	34.70	51.40	17.60	6.60	6.00	5.80	54.90	49.20
12	Sabu Raijua	17.60	18.29	5.00	5.65	9.00	6.70	7.20	8.36
13	Malaka	64.15	64.38	3.00	2.00	00.5	1.55	0.23	0.00

Sumber: BPS Prov. NTT, data diolah tahun 2021

Manggarai Timur adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten Manggarai Timur merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai, tepatnya pada tanggal 17 juli 2007. Luas wilayahnya 2.643,41 km², memiliki 9 kecamatan, 17 kelurahan dan 159 desa. jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur tahun 2021 sebanyak 276.155 jiwa. Sedangkan Kabupaten Sabu Raijua adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Kupang pada 29 oktober 2008. Luas wilayah 459,58 km², memiliki 6 kecamatan, 5 kelurahan dan 63 desa.

Fokus penelitian ini adalah membandingkan kinerja Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sabu Raijua. Kedua Kabupaten ini termasuk dalam daftar daerah tertinggal karena masih terdapat berbagai aspek dari permasalahan keuangan daerah yang dihadapi yaitu: (1) ketergantungan Pemerintah Daerah kepada subsidi dari Pemerintah Pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan Pemerintah Pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber PAD yang tercermin dari penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada, (4) efisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah

Berikut adalah data APBD dari Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2018-2019.

Tabel 1.7

Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Manggarai Timur Anggaran 2018-2019

Uraian	Kabupaten Manggarai Timur					
	2018			2019		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	1.036.686.513.346,73	974.160.217.436,37	93,97	1.131.986.354.468,00	1.037.864.670.750,37	91,69
PAD	49.507.713.692,00	32.814.717.337,37	66,28	61.755.394.345,00	40.152.816.777,37	65,02
Dana Perimbangan	766.627.462.330,00	764.510.441.819,00	99,72	788.240.681.626,00	786.724.967.841,00	99,81
Lain-lain Pendapatan Daerah Sah	220.551.337.324,73	176.835.058.280,00	80,18	281.990.278.497,00	210.986.886.132,00	74,82
Belanja Daerah	1.074.838.174.803,11	972.631.282.579,03	90,49	1.162.228.417.918,72	1.043.483.669.163,09	89,78
Belanja Tidak Langsung	575.295.414.703,12	563.595.661.691,00	97,97	602.491.079.678,06	593.820.442.644,38	98,56
Belanja Langsung	499.542.760.099,99	409.035.620.888,03	81,88	559.737.338.240,66	449.663.226.518,71	80,33
Surplus/Defisit	(38.151.661.456,38)	1.528.934.857,34	(4,01)	(30.242.063.450,72)	(5.618.998.412,72)	18,58
Pembiayaan						
Penerimaan Pembiayaan	49.151.661.456,38	48.310.744.783,38	98,29	41.242.063.450,72	40.458.730.110,72	98,10
Pengeluaran Pembiayaan	11.000.000.000,00	10.750.000.000,00	97,73	11.000.000.000,00	10.000.000.000,00	90,91
Pembiayaan Netto	38.151.661.456,38	37.560.744.783,38	98,45	30.242.063.450,72	30.458.730.110,72	100,72
SiLPA	-	39.089.679.640,72	-	0.00	24.839.731.698,00	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, Data Diolah, Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 1.3 di atas, pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2018-2019 tidak mencapai target yang ditetapkan. Realisasi pendapatan daerah yang dianggarkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.036.686.513.346,37 sedangkan yang terealisasi hanya Rp.974.160.217.436,37, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan dimana realisasi pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 1.131.986.354.468,00 namun yang terealisasi hanya sebesar Rp. 1.037.864.670.750,37. Pada bagian belanja daerah, total realisasi belanja daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.074.838.174.803,11 sedangkan yang terealisasi Rp. 972.631.282.579,03 dan pada tahun 2019 anggaran realisasi belanja yang dianggarkan sebesar Rp.1.162.228.417.918,72 namun yang terealisasi sebesar Rp. 1.043.483.669.163,09.

Ditinjau dari aspek belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, belanja tidak langsung memiliki porsi pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan belanja langsung, realisasi kedua belanja tersebut cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 realisasi belanja tidak langsung Kabupaten Manggarai Timur sebesar Rp. 563.595.661.691 dan meningkat pada tahun 2019 sebesar Rp. 593.820.442.644,38.

Berikut adalah data APBD dari Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2018-2019:

Tabel 1.8
Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sabu Raijua Anggaran 2018-2019

Uraian	Kabupaten Sabu Raijua					
	2018			2019		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	572.929.207.130,73	547.008.957.169,23	95,48	639.798.879.821,00	568.573.178.248,00	88,87
PAD	52.053.909.323,00	26.822.239.476,23	51,53	45.452.754.415,00	26.660.839.267,00	58,66
Dana Perimbangan	443.421.634.037,00	442.426.336.550,00	99,78	482.581.279.858,00	462.822.025.176,00	95,91
Lain-lain Pendapatan Daerah Sah	77.453.663.770,73	77.760.381.143,00	100,4	111.764.845.548,00	79.090.313.805,00	70,76
Belanja Daerah	688.667.063.833,91	538.504.428.592,00	78,2	779.977.460.143,40	634.591.918.165,00	81,36
Belanja Tidak Langsung	243.777.211.814,91	236.620.657.926,00	97,06	330.297.314.348,80	301.457.855.817,00	91,27
Belanja Langsung	444.889.852.019,00	301.883.770.666,00	67,86	449.680.145.794,60	333.134.062.348,00	74,08
Surplus/Defisit	-115.737.856.703,18	8.504.528.577,23	-7,35	-140.178.580.322,40	-66.018.739.917,00	47,1
Pembiayaan						
Penerimaan Pembiayaan	168.487.856.703,18	164.986.237.350,18	97,92	169.178.580.322,40	130.584.791.996,04	77,19
Pengeluaran Pembiayaan	52.750.000.000,00	52.750.000.000,00	100	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	100
Pembiayaan Netto	115.737.856.703,18	112.236.237.350,18	96,97	140.178.580.322,40	101.584.791.996,04	72,47
SiLPA	-	120.740.765.927,41	-	-	35.566.052.079,04	-

Sumber: Badan Keuangan Prov. NTT, Data Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2018 sebesar Rp. 547.008.957.169,23 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 568.573.178.248,00. Namun pada kenyataannya sumber penerimaan/pendapatan terbesar dari Kabupaten Sabu Raijua adalah dana perimbangan dari Pemerintah pusat. Realisasi dana perimbangan Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2018 sebesar Rp. 442.226.336.550 dan meningkat pada tahun 2019 sebesar Rp.462.822.025.176. Sedangkan Pendapatan Asli Daerahnya sangat rendah dan jauh dari total pendapatan dan tidak mampu membiayai sendiri urusan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Namun, jika dilihat belanja daerah Kabupaten Sabu Raijua dari tahun 2018-2019, terlihat bahwa anggaran belanja tidak langsung lebih besar dari anggaran belanja langsung. Padahal, porsi belanja langsung yang ideal adalah 70% dan belanja tidak langsung sebesar 30%. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengamanatkan agar rencana alokasi belanja lebih mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik (belanja Langsung) daripada kepentingan aparatur (belanja tidak langsung). Selain itu, dari tahun 2018-2019 dapat dilihat pula bahwa realisasi belanja langsung lebih kecil dibandingkan anggarannya. Realisasi belanja langsung pada tahun 2018 sebesar Rp. 444.777.211.814,91 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 333.134.062.348,00.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tertinggal Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2018-2019**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tertinggal Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sabu Raijua”.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan Rumusan masalah pada penelitian ini maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai salah satu media untuk memperdalam ilmu akademik penulis, dan memahami lebih dalam penerapan ilmu pengetahuan pada tataran teori dan aplikasinya.

b. Bagi pihak pemerintahan

Dapat digunakan sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan kinerja keuangannya pada tahun-tahun berikutnya

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan atau dasar penelitian lebih lanjut bagi penelitian lain untuk melakukan kajian atau penelitian dalam aspek serupa.